

Strategi Manajemen Sekolah dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Berbasis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kalimantan Selatan (Studi Kasus: SMA dan SMK di Wilayah Rawan Banjir Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin)

Bambang Dedi Mulyadi^{1*}, Ahmad Suriansyah², Aslamiah³

^{1,2,3}Program Doktor Administrasi Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: 2541216310012@mhs.ulm.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 08 Agustus, 2026

Page: 3416-3422

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3092>

Article History:

Received: Juni 05, 2026

Revised: Juli 14, 2026

Accepted: Agustus 18, 2026

Abstract : *The escalation of hydrometeorological disasters, particularly flooding in South Kalimantan Province, demands the strengthening of mitigation capacity in the secondary education sector through the Disaster-Safe School Unit (SPAB) policy. This research aims to deconstruct school management strategies in senior high schools (SMA) and vocational high schools (SMK) within flood-prone areas of Banjar Regency and Banjarmasin City in implementing the tri-pillars of SPAB. Adopting a qualitative approach with a multiple-case study design, data were gathered through in-depth interviews, nonparticipant observations, and document analysis, and subsequently analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal a significant implementation gap driven by the phenomenon of isomorphic mimicry. School management strategies remain reactive-instrumental, predominantly focused on protecting physical assets (Pillar 1). Conversely, managerial governance capacity (Pillar 2) and the enculturation of risk literacy (Pillar 3) are still in an embryonic phase due to the inelasticity of funding regulations (BOS) and the absence of a School Contingency Plan. The implications of this study emphasize the urgency of reconstructing micro-level policies by integrating disaster risk reduction (DRR) budgets into the School Activity and Budget Plan (RKAS) and formulating localized technical guidelines adaptive to the geomorphological characteristics of marshland and riverine flood-prone areas.*

Keywords : *School Management Strategy, Disaster Risk Reduction, SPAB, Flooding, Institutional Resilience.*

Abstrak : *Eskalasi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, menuntut penguatan kapasitas mitigasi pada sektor pendidikan menengah melalui kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi strategi manajemen sekolah di SMA dan SMK wilayah rawan banjir Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan tri-pilar SPAB. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus jamak (multiple-case study), data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementation gap yang signifikan akibat fenomena isomorphic mimicry.*

Strategi manajemen sekolah masih bersifat reaktif-instrumental yang didominasi oleh perlindungan aset fisik (Pilar 1). Sementara itu, kapasitas tata kelola manajerial (Pilar 2) dan enkulturasi literasi risiko (Pilar 3) masih berada pada fase embrionik akibat inelastisitas regulasi pendanaan (BOS) dan ketiadaan Rencana Kontinjensi Sekolah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan mikro melalui integrasi anggaran PRB dalam RKAS dan perumusan Petunjuk Teknis lokal yang adaptif terhadap karakteristik geomorfologi wilayah rawan banjir rawa dan sungai.

Kata Kunci : Strategi Manajemen Sekolah, Pengurangan Risiko Bencana, SPAB, Banjir, Resiliensi Kelembagaan

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang signifikan, dengan klasifikasi risiko sedang. Namun demikian, kedua wilayah tersebut dikenal sebagai daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman banjir karena kondisi geografis, topografi dataran rendah, serta keberadaan daerah aliran sungai yang luas. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan melalui kerusakan sarana dan prasarana sekolah, terganggunya proses pembelajaran, serta menurunnya kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan secara berkelanjutan. Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022–2026 (BPBD Kalimantan Selatan, 2022) menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor prioritas yang memerlukan penguatan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Kirchherr et al. (2023) yang menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi dapat mengganggu keberlangsungan sistem pendidikan apabila tidak didukung oleh tata kelola risiko yang memadai. Selain itu, Lassa et al. (2023) menjelaskan bahwa banjir berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, kerusakan fasilitas sekolah, serta memperlambat proses pemulihan pendidikan setelah bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sekolah dalam menghadapi bencana menjadi kebutuhan yang semakin penting, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi seperti Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Sebagai bentuk komitmen dalam membangun ketahanan sektor pendidikan, pemerintah Indonesia menetapkan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang disusun dengan mengacu pada kerangka *Comprehensive School Safety* (CSS). Kebijakan ini dikembangkan melalui tiga pilar utama, yaitu fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah, serta pendidikan pengurangan risiko bencana. Ketiga pilar tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam menghadapi bencana. Widodo et al. (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi *Comprehensive School Safety* bergantung pada keterpaduan antara aspek infrastruktur, tata kelola kelembagaan, dan pendidikan kebencanaan. Di sisi lain, pendidikan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah apabila disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana di masing-masing daerah (Septikasari et al., 2022; Wicaksono & Sibuea, 2022).

Meskipun kebijakan SPAB telah diterapkan secara nasional, implementasinya di berbagai daerah masih menunjukkan hasil yang beragam. Amri et al. (2022) mengemukakan bahwa pelaksanaan SPAB di Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek kepemimpinan sekolah, koordinasi antarlembaga, dan kepastian alokasi pendanaan. Hasil penelitian Wicaksono & Sibuea (2022) dan Ma'sum (2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SPAB sangat

dipengaruhi oleh kapasitas manajemen sekolah dalam mengelola sumber daya, menyusun perencanaan, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada wilayah dengan karakteristik bencana yang berbeda sehingga belum memberikan gambaran yang memadai mengenai strategi manajemen sekolah di kawasan lahan basah yang didominasi oleh banjir rob, luapan sungai, dan genangan berkepanjangan.

Kalimantan Selatan memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan sebagian besar wilayah penelitian terdahulu. Kondisi lahan basah menyebabkan sekolah menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam mengelola risiko bencana sehingga strategi manajemen yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan daerah yang memiliki karakteristik ancaman berbeda. Sampai saat ini, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi manajemen sekolah dalam implementasi SPAB pada kawasan lahan basah masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen sekolah dalam implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada SMA dan SMK di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi manajemen sekolah yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah rawan banjir serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan SPAB di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikonstruksi menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif berdesain studi kasus jamak (*multiple-case study*) (Yin, 2018). Lokus penelitian ditetapkan melalui penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*) pada kluster SMA dan SMK di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin yang secara historis berada pada delineasi zona merah bahaya banjir, berdasarkan pemetaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Unit analisis dalam studi ini difokuskan pada kapasitas kelembagaan dan tata kelola manajerial sekolah, sedangkan unit observasinya mencakup interaksi aktor manajerial serta instrumen kebijakan turunan di tingkat satuan pendidikan.

Pengumpulan data empiris digali secara iteratif melalui mekanisme triangulasi sumber dan metode, yang terdiri atas: (1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), melibatkan informan kunci (*key informants*) yang dipilih secara snowball sampling, mencakup Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, guru pembina ekstrakurikuler, serta representasi aktor birokrasi (Dinas Pendidikan dan BPBD); (2) Observasi Partisipatif Non-Reaktif, difokuskan pada pengamatan langsung terhadap modifikasi arsitektural bangunan sekolah (elevasi lantai, jalur evakuasi) dan visibilitas sarana mitigasi; serta (3) Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*), untuk membedah muatan dokumen strategis seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Kurikulum Operasional, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) kedaruratan.

Untuk menjamin ketelitian ilmiah, keabsahan data (*trustworthiness*) diuji menggunakan kriteria Lincoln & Guba (1985). Uji kredibilitas (*credibility*) dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan validasi silang partisipan (*member checking*), sementara uji dependabilitas (*dependability*) dipastikan melalui jejak rekam audit (*audit trail*) atas keputusan metodologis. Data empiris kemudian direduksi dan dianalisis menggunakan kerangka model interaktif (Miles et al., 2014) yang mencakup kondensasi data, perbandingan visualisasi pola silang-kasus (*cross-case pattern matching*) antara wilayah Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, hingga penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada SMA dan SMK di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin belum berjalan secara optimal. Setiap pilar telah diimplementasikan oleh sekolah, namun masih terdapat perbedaan antara ketentuan dalam kebijakan SPAB dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi manajemen sekolah dalam pengurangan risiko bencana masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek tata kelola dan kesiapsiagaan kelembagaan.

Pilar 1: Fasilitas Sekolah Aman

Pada aspek fasilitas sekolah aman, strategi yang dilakukan sekolah masih didominasi oleh upaya penyesuaian fisik sebagai respons terhadap banjir, seperti peninggian lantai bangunan, pemindahan aset penting ke lokasi yang lebih aman, serta perbaikan drainase di lingkungan sekolah. Meskipun langkah tersebut mampu mengurangi dampak banjir dalam jangka pendek, penerapan konsep *build back better* belum menjadi bagian dari perencanaan pembangunan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lassa *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menghambat proses pembelajaran apabila tidak diikuti dengan perencanaan infrastruktur yang adaptif. Widodo *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa penyediaan fasilitas sekolah yang aman merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan *Comprehensive School Safety*.

Pilar 2: Manajemen Bencana di Sekolah

Pada aspek manajemen bencana, sebagian besar sekolah masih berfokus pada penanganan saat bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah (TSBS) di beberapa sekolah belum didukung oleh legalitas formal melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah. Selain itu, keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu kendala dalam penyediaan program mitigasi bencana secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Amri *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa implementasi SPAB sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah dan dukungan pendanaan. Temuan ini juga didukung oleh Wicaksono & Sibuea (2022) dan Ma'sum (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas SPAB sangat bergantung pada kapasitas manajemen sekolah dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan internal, dan membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di tingkat daerah, koordinasi antara sekolah dengan BPBD juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPAB (Muzdalifah *et al.*, 2023).

Pilar 3: Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana

Pada aspek pendidikan pengurangan risiko bencana, materi kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Pembelajaran masih dilakukan secara insidental melalui mata pelajaran tertentu, seperti Geografi, maupun kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan pada SMK materi kebencanaan relatif lebih terintegrasi melalui pembelajaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pengurangan risiko bencana belum menjadi bagian yang sistematis dalam proses pembelajaran di sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septikasari *et al.* (2022), menegaskan bahwa pendidikan kebencanaan perlu diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam kurikulum agar mampu membangun budaya kesiapsiagaan. Selain itu, Wardhani *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPAB dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dukungan regulasi, kemitraan, pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan tiga pilar SPAB secara konsisten di lingkungan sekolah.

Penelitian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa tata kelola SPAB di jenjang pendidikan menengah Kalimantan Selatan masih terjebak pada fenomena isomorphic mimicry di mana sekolah secara administratif seolah telah mengadopsi kebijakan, namun secara fungsional belum memiliki kapasitas adaptif yang esensial. Diferensiasi strategi tata kelola antara entitas pendidikan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dapat didekonstruksi berdasarkan tipologi ancaman banjir yang dikodifikasi dalam matriks komparasi kapasitas implementasi (Tabel 1).

Tabel 1. Matriks Komparasi Kapasitas Implementasi SPAB (SMA/SMK) di Wilayah Terdampak

Indikator SPAB	Kota Banjarmasin (Karakteristik: <i>Banjir Rob/Pasang Surut</i>)	Kabupaten Banjar (Karakteristik: <i>Banjir Luapan Sungai & Rawa</i>)
Pilar 1 : Fasilitas Aman	Adaptasi peninggian lantai dasar kelas, rekayasa drainase lokal, dan pemanfaatan pompa air mekanis skala kecil.	Pembangunan panggung kayu darurat (aparapar) di dalam kelas, pemindahan

Pilar 2 : Manajemen Bencana	Berfokus pada SOP kedaruratan evakuasi cepat dan sanitasi lingkungan pasca-genangan rob. Mayoritas TSBS belum di-SK-kan.	aset inventaris ke bangunan vertikal (lantai 2). Pembentukan Satgas insidental musiman. Berfokus pada SOP penghentian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sementara akibat genangan persisten.
Pilar 3 : Pendidikan	Terbatas pada insersi ekstrakurikuler (PMR/ Pramuka) dengan penekanan pada higienitas air bersih.	Diintegrasikan secara insidental pasca-bencana dengan penekanan pada keselamatan perairan (evakuasi perahu/getek).

Merujuk pada Tabel 1, hasil analisis menunjukkan bahwa strategi manajemen sekolah dalam implementasi SPAB berbeda sesuai dengan karakteristik ancaman banjir yang dihadapi masing-masing wilayah. Sekolah di Kota Banjarmasin lebih berfokus pada pengelolaan sanitasi lingkungan, perbaikan drainase mikro, dan pengendalian dampak banjir rob yang terjadi secara berkala. Sementara itu, sekolah di Kabupaten Banjar lebih memprioritaskan penyesuaian tata ruang melalui penggunaan *apar-apar*, pemindahan sarana pembelajaran ke lokasi yang lebih aman, serta penyusunan skenario penghentian sementara kegiatan belajar mengajar ketika banjir berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPAB sangat dipengaruhi oleh karakteristik risiko bencana pada masing-masing wilayah sehingga pendekatan yang diterapkan tidak dapat diseragamkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amri *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa implementasi SPAB di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat sekolah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Wardhani *et al.* (2024) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik ancaman bencana di wilayahnya. Selain itu, Nurdiansyah & Nurwati (2025) menegaskan bahwa kapasitas kepemimpinan sekolah, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana.

Sebagian besar sekolah belum memiliki Rencana Kontinjensi Sekolah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menghadapi kondisi darurat. Akibatnya, penanganan bencana masih bersifat reaktif dan lebih banyak bergantung pada pengalaman maupun keputusan yang diambil ketika bencana terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi bagian dari tata kelola sekolah. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana menekankan pentingnya koordinasi dan peran berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks implementasi SPAB, sinergi antara Dinas Pendidikan, BPBD, dan satuan pendidikan menjadi aspek penting untuk mendukung penyusunan petunjuk teknis yang sesuai dengan karakteristik wilayah rawan banjir. Pendampingan kepada sekolah juga perlu ditingkatkan, terutama dalam penyusunan rencana kontinjensi, pengembangan prosedur operasional, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan sekolah. Temuan ini sejalan dengan Widowati *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan program sekolah aman tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga oleh penguatan tata kelola, kepemimpinan sekolah, serta budaya kesiapsiagaan yang dibangun secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Wicaksono & Sibuea (2022) dan Ma'sum (2024) bahwa implementasi SPAB memerlukan dukungan kebijakan daerah, kepastian pendanaan, dan koordinasi antarlembaga agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi manajemen sekolah dalam implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada SMA dan SMK di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin belum terlaksana secara optimal karena masih berfokus pada perlindungan infrastruktur fisik, sementara penguatan tata kelola kelembagaan dan pendidikan pengurangan risiko bencana belum berjalan secara menyeluruh. Keterbatasan fleksibilitas pendanaan, belum optimalnya pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah, serta belum tersusunnya Rencana Kontinjensi Sekolah menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi SPAB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi manajemen sekolah melalui penyusunan petunjuk teknis yang sesuai dengan karakteristik wilayah rawan banjir, penguatan kapasitas kelembagaan sekolah, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan dan penganggaran sekolah agar tercipta satuan pendidikan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pascasarjana Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan akademik selama pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala sekolah, guru, serta seluruh informan dari SMA dan SMK di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., Lassa, J. A., Tebe, Y., Hanifa, N. R., Kumar, J., & Sagala, S. (2022). Pathways to Disaster Risk Reduction Education integration in schools: Insights from SPAB evaluation in Indonesia. In *International Journal of Disaster Risk Reduction* (Vol. 73). <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102860>
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023*. (2023).
- Kirchherr, J., Yang, N. N., Schulze-spüntrup, F., Heerink, M. J., & Hartley, K. (2023). *Resources , Conservation & Recycling Conceptualizing the Circular Economy (Revisited) : An Analysis of 221 Definitions*. 194(September 2022).
- Lassa, J., Petal, M., & Surjan, A. (2023). Understanding the impacts of floods on learning quality, school facilities, and educational recovery in Indonesia. *Disasters*, 47(2). <https://doi.org/10.1111/disa.12543>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. In *Beverly Hills, Calif. : Sage Publications*.
- Ma'sum, A. A. (2024). Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dalam Membangun Resiliensi Sekolah di MAN 3 Bantul. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.21831/sakp.v13i2.21687>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). In *SAGE Publications*.
- Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani, M. K. (2023). Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.1898>
- Nurdiansyah, M. I., & Nurwati, D. (2025). Evaluating School Disaster Preparedness: A Comparative Study Between Urban and Rural Areas in Indonesia. In *Priviet Social Sciences Journal* (Vol. 5, Issue 8, pp. 302–316). <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.524>
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (n.d.). In *Pemerintah Provinsi Kalimantan*

- Selatan*. Wiley. <https://doi.org/10.1111/lit.v53.4>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. (2019). In *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Wiley. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137746/permendikbud-no-33-tahun-2019>
- Septikasari, Z., Retnowati, H., & Wilujeng, I. (2022). Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sebagai Strategi Ketahanan Sekolah Dasar dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1). <https://doi.org/10.22146/jkn.74412>
- Wardhani, P. I., Musiyam, M., Wibowo, Y. A., Rahmadana, A. D. W., Utami, S., & Edwin. (2024). Evaluation of disaster safe education unit programme implementation in Mt. Merapi using the pressure state response approach. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1769>
- Wicaksono, F. A., & Sibuea, R. P. (2022). Efektivitas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2769>
- Widodo, E., Dwiningrum, S. I. A., & Hastuti. (2024). Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Perspektif Teori Kognitif Sosial. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 12(3).
- Widowati, E., Koesyanto, H., Istiono, W., Sutomo, A. H., & Sugiharto. (2023). Disaster Preparedness and Safety School as a Conceptual Framework of Comprehensive School Safety. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231211209>
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). In *SAGE Publications*.